

**POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI DESA
KETAPANG PERMAI DAN DESA TANJUNG KULIM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2015**

By:
Nuratika
Supervisor:
Email : nuratika@gmail.co.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru
288293-
Telp/Fak. 0761-63277

ABSTRACT

The rising tide of money politics is very dangerous implications for the strengthening of democracy and the nation state. Through money politics, sovereignty is not there at the hands of the people but the sovereignty is in the hands of "money". Therefore, the sovereign is "the owner of money", no longer a majority of the people. If there is any doubt about the political correctness of money in Meranti Islands District in the elections in 2015, should be respected because: first, post-election was not a dispute of money politics of electoral participants from both institutional and individual Political Parties (candidate); secondly, the absence of evidence of the voting public reporting documents that can be justified; Third, the findings nihilnya Election Supervisory Authority about the practice of money politics.

This study uses qualitative research methods with an assessment of descriptive data. In collecting the data, researchers use interviewing techniques, observation and studikepustakaan. By using key informants and informant as a supplementary source of information.

These results indicate that the lack of public trust in government is also one of the factors that lead to high politics of money in society. Factors that lead to jobs or economic society can not avoid the occurrence involved money politics. Lack of socialization prospective head region and the lack of nearby party to the public conducted by candidates and political parties bearers resulting lack of public knowledge of who and what the vision-mission to be carried out if the candidate won the election. The dominant factor affecting the high politics of money people in the District of Kepulauan Meranti is apathy, which was influenced by the apathy of political awareness and public confidence in the government. Apathy is also related to factors which the administration of the public should be able to use their voting rights by using an ID card.

Keywords: Money Politics, Regional Head Election

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 2 berbunyi “Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Berdasarkan hal tersebut maka sewajarnya sebuah Pemilu harus menggunakan asas JURDIL dan LUBER, guna terciptanya sebuah demokrasi serta pesta demokrasi yang sehat dan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan juga sesuai dengan amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN.

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 173 menjelaskan ayat (1) bahwa dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak serta merta menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ayat (2) Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeritah daerah.

Namun dalam pilkada yang ada maupun pemilu secara umum maka asas JURDIL dan LUBER hanyalah sebuah slogan belaka, karena pada dasarnya politik uang merupakan sebuah sistem yang tidak akan

pernah hilang dalam proses demokrasi Indonesia dan hal ini akan terus menerus terjadi dan dilakukan oleh para calon dan Jurkam serta Timses masing-masing calon dalam pilkada dan pemilu guna mencari perhatian serta suara dari para calon pemilih untuk memenangkan mereka dalam PEMILU.

Merebaknya politik uang membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan penguatan negara bangsa. Melalui politik uang, kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan “uang”. Oleh karena itu, pemegang kedaulatan adalah “pemilik uang”, bukan lagi rakyat mayoritas.

Di tengah gelombang demokratisasi yang gencar belakangan ini, maraknya politik uang bisa mempermudah masuknya penetrasi politik melalui uang. Hal yang paling umum dalam praktek politik uang adalah pembelian suara menjelang hari pemilihan. Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara orang ketiga.

Jika kita lihat praktik politik uang dengan sasaran pemilih atau rakyat secara umum akan sangat sulit diukur keberhasilannya. Karena disamping medannya sangat luas juga banyaknya jumlah pemilih. Apakah rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau memilih yang telah memberikan uang atau mereka ’berkhianat’. Karena dalam masyarakat telah berkembang pemahaman bahwa pemilu bukan saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi uang.

Demikian eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika politik uang tetap merajalela niscaya calon yang potensial melakukan

praktik tersebut hanya yang memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik politik uang adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai.

Adapun yang dirugikan adalah rakyat. Karena ketika calon tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia akan mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan pihak penyumbangannya, kelompoknya daripada interest public. Fenomena ini sudah pasti menjadikan demokrasi kita tidak sehat.

Gangguan isu politik uang (*Politik Uang*) ditengah masyarakat pemilih, sebelum dan sesudah penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kepulauan Meranti, bila dicermati akan mencederai pembangunan demokrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebab Luberjurdil sebagai azas Pemilu, sama sekali tidak membenarkan terjadinya praktek politik uang. Bila ada keraguan tentang kebenaran politik uang di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pemilu 2015, harus dihormati karena : pertama, paska Pemilu tidak terjadi persengketaan politik uang dari peserta Pemilu baik dari kelembagaan Partai Politik maupun perseorangan (kandidat) ; kedua, tidak adanya bukti dokumen pelaporan masyarakat pemilih yang dapat dipertanggung jawabkan; ketiga, nihilnya temuan Lembaga Pengawas Pemilu tentang praktek politik uang. Pemikiran bahwa politik uang bagaikan misteri yang sangat sulit dibuktikan (secara hukum) juga patut dihormati, namun juga jangan dilupakan bahwa gejala

sosial tertentu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tidak bisa lepas dari pepatah “tiada asap tanpa api“..

Berdasarkan buku Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Politik uang Kolusi dan Nepotisme, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: pertama, nihilnya budaya rasa malu. Padahal malu itu adalah terapi psikologis untuk menurunkan derajat politik uang, politik uang dan sejenisnya. Sedangkan makin tinggi rasa malu seseorang semakin tinggi pula tingkat kontrol psikologi untuk takut berbuat yang tidak baik. Merugikan negara/masyarakat.

Faktor kedua adalah lemahnya sanksi moral di tengah masyarakat. Masyarakat di hadapkan kepada buah simalakama. Karena banyak kita jumpai orang -orang yang melakukan itu realitanya adalah orang yang menjadi donatur utama atau donatur tetap di sebuah tempat ibadah, organisasi-organisasi sosial keagamaan, panti asuhan, dan lain sebagainya. Memang orang-orang seperti itu sangat amat lihai dengan trik-triknya dalam menarik simapti dari masyarakat.

Dalam konteks budaya sebenarnya kita munafik dan penuh pertimbangan moral dalam memberi sanksi sosial. Seandainya masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak munafik, sudah barang tentu tidak akan menerima uluran tangan dan bantuan dari orang-orang yang jelas perolehan uang atau bantuannya itu tidak baik. Bahkan seharusnya masyarakat mengisolasi dari pergaulan sosial. Sanksi sosial yang nampak sederhana ini dipastikan akan mampu mengeliminir dan meminimalisir perilaku tidak patut itu.

Untuk menumbuh kembangkan rasa malu terhadap perilaku politik uang dapat diwujudkan dalam bentuk yang sederhana, yakni: perlunya mewujudkan dalam bentuk solidaritas anti politik uang sebagai bentuk rasa cinta negara Indonesia (nasioanlisme) agaknya kita perlu menggelorakan slogan -slogan reflektif anti politik uang. Misalnya : “Pelaku Politik uang Tak Nasionalis”, dan lain-lainnya.

Berdasarkan penjelasan yang ada, penulis melihat bahwa hal tersebut merupakan suatu bahan yang menarik untuk di angkat menjadi bahan penelitian dengan judul : **“Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Ketapang Permai Dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015”**

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif yang berusaha memberikan gambaran terhadap yang terjadi yang dikenal dengan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi secara factual dan cermat (Rahmat, 2004:25).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini tentang Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015. Alasan peneliti mengambil daerah Kepulauan Meranti adalah Kawasan Daerah Pemekaran yang belum lama di bentuk.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan keterangan atau informan. Informan adalah salah satu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang ia ketahui.

Tabel. 3.1 Informan

No	Informan
1	KPUD Meranti
2	Tim Sukses Pilkada Desa Ketapang Permai
3	Tim Sukses Pilkada Desa Tanjung Kulim
4	Panwaslu
5	Masyarakat

4. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan meliputi :

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh melalui riset lapangan dengan mengadakan penelitian langsung kepada perusahaan yang menjadi objek penelitian guna mendapatkan sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan, data primer ini berupa wawancara langsung kepada pimpinan perusahaan terutama bagian personalia dan staf-stafnya. Data primer ini dapat juga berupa quisioner pada sumber yang dapat diharapkan jawabannya serta membantu penulis dalam penelitiannya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari perusahaan tentang jumlah penduduk Desa Tanjung Kulim dan Ketapang Permai.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview)
Yaitu secara langsung mengadakan tanya jawab dengan bagian personalia yang diberi wewenang untuk memberikan penjelasan atas nama perusahaan. Metode ini dipakai untuk memperjelas data yang telah diperoleh.
- b. Dokumentasi
Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. (Hamidi, 2004:72)

6. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kegiatan penelitian, kemudian membandingkannya dengan teori yang ada, selanjutnya menarik kesimpulan dari analisis tersebut.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mendorong Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Ketapang Permai dan Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti

Riauterkini Kamis, (10 Desember 2015 21:58)-Selatpanjang - Puluhan massa dari pasangan calon Bupati Kepulauan Meranti, Tengku Mustafa -Amyurlis (Bermutu), Kamis (10/12/15) sore tadi mendatangi Kantor Panwaslu

Meranti, Jalan Banglas, Selatpanjang. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Amyurlis itu melaporkan pelanggaran Pilkada 9 Desember lalu, yakni politik uang yang diklaim dilakukan pihak pasangan Pro Bisa (Irwan-Said Hasiym).

Selasa, 05 Januari 2016 - 15:47 WIB Riaubook, Hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Kepulauan Meranti (Riau) 9 Desember lalu diragukan kualitasnya lantaran ditemukan indikasi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif (TSM). Kecurangan TSM ini diduga dilakukan dengan sangat rapi, karena melibatkan sejumlah pihak dengan cara mengarahkan masyarakat agar memilih pasangan calon tertentu, disertai dengan pembagian sejumlah uang (money politic) sebagai imbalannya. Kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2, Tengku Mustafa-Amyurlis, Samino mengaku memiliki banyak bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa telah terjadi kecurangan TSM di pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari 9 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, 6 di antaranya telah terjadi kecurangan baik jelang hari pemungutan suara hingga dihari pencoblosan.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang juga sangat mempengaruhi keterlibatan masyarakat terhadap politik uang. Karena semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang maka dia akan menjadi lebih cerdas dalam memilih pemimpin, terlepas dari politik uang. Dan pada kenyataannya di Indonesia tingkat pendidikan masyarakat masih sangat minim, dan inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum dari parpol tertentu

untuk melancarkan politik uangnya. Ketika kondisi ini terus-terusan terjadi maka harapan kita untuk mendapatkan pemilu yang demokratis, jujur dan bersih akan sulit untuk tercapai. Oleh karena itu dikira perlu untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia.

Menurut kepala KPUD Meranti Bapak Nurdin ND, saat ditanya mengenai faktor yang pendidikan dan kesadaran politik terhadap politik uang Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015, menurut nya:

“Kalau saya lihat, pengaruh tingkat pendidikan dan kesadaran politik terhadap terjadinya politik uang sangat memiliki peran yang besar. Faktor kesadaran politik lebih disebabkan oleh Kesadaran masyarakat yang belum mendalam mengenai hakikat politik itu sendiri, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah dianggap lebih pada sebuah acara ramai-ramai belaka. Belum sampai pada kesadaran bahwa pemilihan kepala daerah adalah kesempatan di mana mereka sama-sama menentukan arah kebijakan untuk kedepannya. (Wawancara, November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran politik bisa membuat masyarakat dengan gampang menerima uang uang diberikan kepadanya, dan tentunya politik uang akan terus terjadi setiap kali ada pemilu, baik itu kepala daerah maupun yang lainnya.

Kemudian menurut salah satu Tim Sukses yang ada di Desa

Ketapang Permai, Bapak IM beliau menuturkan :

“Rata-rata tingkat pendidikan yang menerima uang adalah setingkat tamatan Sd dan SMP. Karena kebanyakan mereka yang penting di kasi uang tanpa memikirkan besaran yang diperolehnya” (Wawancara, November 2016)

Hal ini memperkuat bahwa tingkat pendidikan bisa menjadi salah satu faktor terjadinya politik uang, karena bagi mereka yang penting mendapatkan sejumlah uang tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah usai pemilu.

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas jelas bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat menjadi penyebab terjadinya politik uang. Selain itu pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi sebagian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya desa Ketapang Permai dan Desa Tanjung Kulim sehingga mereka tidak menggunakan hak politiknya dalam pemilihan, kecuali diimingi-imingi uang oleh salah satu calon kepala daerah mengingat pekerjaan yang mereka geluti sangat mempengaruhi urusan kehidupan mereka sehari-hari.

Tingkat Pendapatan Pemilih (Kemiskinan)

Faktor ekonomi disini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan, dimana pemilih lebih mementingkan kebutuhan ekonomi mereka dibandingkan dengan ikut serta berpartisipasi pada setiap kegiatan pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah. Tuntutan pekerjaan atau ekonomi merupakan tuntutan yang paling mendesak bagi

masyarakat yang apabila dihadapkan pada pilihan antara harus bekerja atau membuka usaha yang mereka miliki, dibandingkan dengan datang ke TPS untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, maka mereka lebih memilih untuk bekerja dan mengejar kebutuhan ekonomi mereka.

Menurut bapak YL masyarakat Desa Tanjung Kulim yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan, saat ditanya mengenai faktor yang mempengaruhi bapak sehingga menerima uang yang diberikan pada saat pemilihan tahun 2015, menurut bapak YL:

“Pada saat pemilihan tahun lalu saya di menerima uang atau hadiah dari calon legislatif atau tim suksesnya dalam kegiatan kampanye karena faktor ekonomi, sehingga dengan menerima uang atau hadiah yang diberikan oleh calon legislatif atau tim suksesnya pada saat kampanye untuk mendapatkan pendapatan tambahan”.
(Wawancara, November 2016)

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh ibu ST masyarakat Desa Ketapang Permai yang bekerja sebagai karyawan toko, ia mengatakan bahwa:

”saya datang ke TPS untuk ikut memilih karena saya akan dikasi hadiah oleh salah satu tim sukses salah satu calon kepala daerah”. (Wawancara, November 2016)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas jelas bahwa alasan ekonomi atau pekerjaan menjadi pertimbangan yang sangat sulit untuk ditinggalkan mengingat pekerjaan yang sedang dijalannya menuntut agar mereka tetap hadir

meskipun sedang ada pesta demokrasi yang berlangsung, namun itu tidak menjadi penting jika sudah menjangkut dengan urusan kebutuhah hidup sehari-hari.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor jumlah pendapatan juga berpengaruh, karena semakin kecil pendapatan seseorang maka ia akan semakin terbuka dan menerima dengan wajar politik uang. Lebih lanjut Burhanudian Muhtadi menjelaskan bahwa politik uang berpengaruh atas perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya, diantara pemilih yang menilai politik uang sebagai kewajiban.

Tingkat Kedekatan Dengan Partai

Faktor minimnya kedekatan parpol dengan masyarakat, berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, Sebanyak 85,5 persen masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan parpol. Dan yang menjadi permasalahannya yakni semakin rendah kedekatan masyarakat dengan parpol, maka sudah tentu mereka pun akan lebih mudah terlibat dalam permainan politik uang. Hal ini dinilai wajar oleh masyarakat itu sendiri, namun bertolak belakang dengan nilai demokrasi yang sudah seharusnya jujur dan adil.

Seperti yang dikemukakan, oleh Panwaslu Desa Ketapang Permai Sdra HM Kabupaten Kepulauan Meranti menurutnya :

Saya menarik kesimpulan bahwa peningkatan 'Party ID' dapat menjadi 'antidote' atau obat penawar atas praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah di

Indonesia, (Wawancara,
November 2016)

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kedekatan parpol dengan masyarakat juga bisa menjadi penyebab maraknya terjadi politik uang, dikarenakan partai yang kurang dekat dengan masyarakat lebih gampang menjalankan aksi bagi-bagi uang.

Hal ini senada dengan pendapat Panwaslu Desa Tanjung Kulim, Bapak NZ menurutnya :

“Semakin dia tidak memiliki kedekatan dengan parpol, semakin dia toleran dan menerima terhadap politik uang. Begitupun sebaliknya, semakin dia dekat dengan parpol, semakin besar kecenderungan menolak, Sebab untuk memperbaiki tingkat pendidikan sulit dilakukan dalam waktu pendek, akan tetapi peningkatan 'Party ID' jauh lebih memungkinkan”(Wawancara,
November 2015)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor karena kedekatan dengan partai atau persamaan ideologi dengan partai politik. Kedekatan dengan partai karena menjadi pengurus, anggota atau simpatisan partai. Semakin pemilih dekat dengan partai politik, maka semakin kecil kemungkinan menerima pemberian politik uang. Akan tetapi sebaliknya, semakin besar kemungkinan menjadi aktor pemberi politik uang.

Dianggap Kezaliman (Kultur)

Budaya politik uang yang terjadi di Desa Ketapang Permai dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten

Kepulauan Meranti tidak lepas oleh factor kemiskinan ekonomi, mentalitas, dan kultur yang meilihat politik sebagai sarana untuk hal-hal yang sifatnya masterialistik. Dalam hal ini, kesucian nilai demokratisasi dalam pemilukades dapat dibeli dengan uang. Masyarakat Desa Ketapang Permai dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti menghendaki bahkan mengharapakan pemberian materi dari suatu calon atau kandidat yang maju menjadi calon kepala Daerah, sehingga praktek politik uang menjadi kewajaran dan sulit untuk dicegah.

Ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh ketua Panwaslu Kabupaten Meranti Bapak IB, yang saat ditanya apakah sebelum pelaksanaan pemilihan bupati ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten. Menurut beliau:

Kalau dari informasi yang diperoleh, besaran yang diperoleh masyarakat dilihat dari segi jumlah atau nominal bervariasi, di Desa Ketapang Permai antara masing-masing calon memberikan dalam jumlah yang berbeda dari Rp. 35.000.00,- hingga Rp.100.000.00,-. Sedangkan di dan Tanjung Kulim masing-masing calon memberikan dalam jumlah Rp. 60.000.00,- sampai dengan Rp. 120.000.00,- tentunya hal ini sangat disayangkan karena sudah tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan yaitu jujur dan adil, akan tetapi ini menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat.(Wawancara,
Oktober 2016)

Pendapat ketua KPU kabupaten ini sesuai dengan pendapat salah satu ketua PPS di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu bapak HS, yang mengatakan bahwa:

“Kalau dari informasi yang kami peroleh, memang politik uang di Kabupaten Meranti ini sudah menjadi budaya setiap pilkada, jadi masyarakat udah terbiasa dengan kondisi seperti ini dari dulu. Sehingga klo tidak ada yang memberikan uang kepada mereka, mereka cenderung untuk tidak ikut memilih datang ke TPS-TPS untuk menggunakan hak pilihnya”. (Wawancara, November 2016)

Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan ketua PPS jelas bahwa Budaya politik uang pada Desa Ketapang Permai masih menjadi salah satu factor yang sangat mendongkrak perolehan suara tiap calon. Itu juga mengontrol partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara siapa yang memberikan uang dan barang paling banyak maka itulah yang pilih oleh masyarakat. Namun hal tersebut tidak terjadi pada pemilukades Desa Tanjung Kulim karena hampir seluruh calon membagikan uang dan barang kepada seluruh lapisan masyarakat jadi masyarakat di desa Dawuahan tetap memilih salah satu calon atau figure yang menurut mereka paling baik. Pemilih di Desa Ketapang Permai dan Desa Tanjung Kulim dapat dikategorikan sebagai pemilih yang rasional.

Kekecewaan Masyarakat Terhadap Kinerja Kandidat

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menimbulkan sikap apatis, namun dalam konteks yang berbeda, dimana masyarakat ingin menggunakan hak pilih yang mereka miliki, namun karena alasan ketidakpercayaan sehingga menimbulkan sikap masa bodoh dari masyarakat terhadap hak suara yang dimiliki.

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat BM salah satu tokoh politik dari partai politik dan merupakan tim sukses di Desa Ketapang Permai, saat ditanya mengenai faktor apa yang menyebabkan tingginya politik uang masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2015 yang lalu, menurutnya:

“.....,masyarakat sudah tidak termotivasi lagi untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pilkada karena masyarakat sudah masa bodoh karena masyarakat beranggapan siapapun yang duduk nanti tidak akan berpengaruh terhadap diri mereka”. (Wawancara, Oktober 2016)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak EK salah satu Tim sukses Desa Tanjung Kulim, saat ditanya mengenai faktor yang mempengaruhi bapak sehingga tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilihan Bupati, beliau menjawab:

“Saya melihat tidak ada tokoh dari antara para calon yang mampu membuat perubahan yang nyata bagi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini, paling calon yang duduk nanti hanya mementingkan kepentingan golongannya saja seperti yang

sudah-sudah”. (Wawancara, Oktober 2016)

Berdasarkan pendapat tersebut bisa dilihat bahwa masyarakat meragukan terciptanya perubahan lewat proses pilkada karena suasana yang ditampilkan selalu tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya atau dengan kata lain masyarakat merasa kecewa dengan kepemimpinan dimasa lalu yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin untuk yang akan datang.

Lemahnya Keinginan Untuk Mencari Nilai

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat dilakukan dengan tindakan atau pun hanya dengan dukungan kepada pemerintah, bentuk penghargaan berupa tindakan yaitu dapat ditunjukkan dengan cara ikut serta melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membangun daerah atau negara itu sendiri, sedangkan bentuk kepercayaan berupa dukungan yaitu dapat dilakukan dengan memberikan dukungan secara sosial atau dukungan secara moral terhadap pemerintah sehingga dengan sendirinya kita akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak ND saat ditanya mengenai bagaimana pengaruh kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap tingginya politik uang pada saat pilkada tahun 2015 yang lalu, beliau mengatakan bahwa

Arti dari pemerintah disini tentu sangat luas, kami (KPU) juga adalah bagian dari pemerintah. Pemerintah disini mungkin lebih kepada pemimpin sebelumnya dan calon-calon yang akan memerintah nanti. Kalau untuk pemimpin yang sebelumnya, menurut saya mungkin masyarakat tidak melihat perubahan yang nyata selama lima tahun pemerintahannya. Sedangkan untuk calon-calon yang baru kelihatannya sebagian masyarakat bersifat pesimis, dalam arti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan siapapun yang akan memimpin nantinya atau dengan kata lain timbulnya kecurigaan dalam diri masyarakat. Faktor ini memang menurut saya merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap tingginya politik uang masyarakat pada pilkada tahun lalu. (Wawancara, Oktober 2016)

Hal yang tidak jauh berbeda juga di sampaikan oleh Panwaslu Desa Ketapang Permai yaitu bapak SS saat ditanya mengenai faktor penyebab banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati tahun 2015 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Beliau menjawab bahwa:

Faktor yang mengakibatkan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya kalau menurut saya lebih dikarenakan oleh sikap malas dari masyarakat terhadap sistem pemilukada

yang kelihatan hanya sebagai rutinitas lima tahun sekali tidak ada perubahan yang berarti setelah pemilu selesai dilaksanakan. Ini terjadi karena para pemimpin yang pernah duduk dipemerintahan tidak memberikan perubahan yang nyata di mata masyarakat. Sehingga siapapun yang akan tampil sebagai calon pasti timbul sikap keraguan di dalam diri mereka (masyarakat)". (Wawancara, Oktober 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPUD dan salah satu ketua RT diatas dimana para informan merasa bahwa adanya krisis kepemimpinan yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga menurut informan, masyarakat meragukan kredibilitas yang dimiliki oleh para calon yang tampil apakah nantinya calon yang ada ini bisa mewakili aspirasi mereka untuk kedepannya atau tidak.

Lemahnya Aturan Main

Menurut Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak ND saat ditanya mengenai bagai mana pengaruh administrasi terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015 yang lalu, menurutnya:

Kalau faktor administrasi memang ada pengaruhnya ini diakibatkan oleh adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal kemudian ada pula pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. Mengapa itu terjadi misalnya sudah meninggal tapi masih

terdaftar dalam DPT ini dikarenakan keluarga yang bersangkutan itu tidak mengurus yang namanya akte meninggal, sehingga kita dalam keadaan ragu-ragu tidak berani mencoret, karena kalau ternyata orang yang bersangkutan ternyata masih hidup kemudian kita coret itu bisa kena pidana. (Wawancara, Oktober 2016)

Selain faktor yang disampaikan oleh ketua KPUD mengenai pemilih ganda, pemilih yang berpindah tempat tinggal dan pemilih yang meninggal. Faktor administrasi ini juga menyangkut terhadap pemilih yang tidak mendapatkan undangan sehingga tidak menggunakan hak suara yang dimiliki. Seperti yang disampaikan oleh BM salah satu Tim sukses di Desa Tanjung Kulim, saat ditanya faktor apa yang menyebabkan tingginya politik uang masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2015 yang lalu,

"kalau saya lihat ada dua faktor yang menyebabkan tingginya politik uang masyarakat, pertama kalau saya lihat banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan, jadi mau tidak mau mereka ini golput karena masyarakat malas untuk mengurus-ngurus kartu undangan tersebut". (Wawancara, Oktober 2016)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak WLM dan bapak YD masyarakat desa Ketapang Permai yang pada intinya mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan kartu undangan sehingga tidak datang ke TPS untuk memilih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya politik uang yang terjadi dalam masyarakat terhadap pemilihan, dimana masyarakat sebenarnya ingin menggunakan hak politik yang mereka miliki namun karena melihat kinerja pemerintah sebelumnya yang tidak memberikan perubahan yang nyata sehingga masyarakat meragukan figur-figur yang tampil dalam pemilihan tahun 2015 yang lalu. Sehingga timbul sikap mengambil keuntungan dari politik uang yang terjadi.
2. Faktor pekerjaan atau Ekonomi yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa menghindar ikut terjadinya politik uang. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan di sektor informal/swasta, dimana sektor ini sangat mengutamakan intensitas pekerjaan, dimana menurut masyarakat pekerjaan yang mereka geluti sangat berpengaruh terhadap kebutuhan mereka sehari-hari, sedangkan pelaksanaan pilkada tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan mereka sehari-hari, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan yang mereka geluti dari pada datang ke TPS untuk berpartisipasi menggunakan hak suara yang mereka miliki. Namun bagi sebagian masyarakat yang membuka usaha atau pekerjaan wiraswasta dimana faktor kerugian yang dirasakan jika mereka ikut serta dalam pemilihan bupati menjadi pertimbangan mereka sehingga tidak ikut serta berpartisipasi dalam pilkada.
3. Kurangnya sosialisasi calon kepala daerah dan kurang dekatnya partai kepada masyarakat yang dilakukan oleh para calon maupun partai politik pengusung mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang siapa dan apa visi-misi yang ingin dilaksanakan jika para calon berhasil memenangkan pilkada, sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan hak politik yang mereka miliki atau bisa dikatakan mereka tidak mau membeli kucing dalam karung.
4. Faktor dominan yang mempengaruhi tingginya politik uang masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sikap apatis, dimana sikap apatis dipengaruhi oleh faktor kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Sikap apatis juga terkait dengan faktor administrasi dimana seharusnya masyarakat dapat menggunakan hak suara yang mereka miliki dengan menggunakan KTP.

B. Saran

1. Penyelenggara pemilu. Sebaiknya KPU dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya menghimbau kepada jajarannya agar melakukan pendataan secara akurat dan menghimbau kepada para ketua RT agar memberikan surat undangan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan bupati tanpa adanya politik uang.
2. Partai politik Partai politik dalam mengusung calon seharusnya mengusung calon yang benar-benar mempunyai kredibilitas atau calon yang benar-benar mempunyai sepak terjang yang baik dimata masyarakat, sehingga ekspektasi masyarakat terhadap pemilihan bupati akan tinggi dan ini tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada.
3. Calon kepala daerah Siapapun yang duduk sebagai bupati sebaiknya mereka segera menepati janji-janji mereka saat sosialisasi/kampanye agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin/pemerintah semakin tinggi dan juga diharapkan bupati terpilih mau turun langsung ke masyarakat dan melihat sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pemimpin yang mereka pilih memang

benar-benar ada di tengah-tengah mereka. Sehingga untuk pemilihan kepala daerah berikutnya tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Austino, Leo dan Muhammad Agus Yusoff, "Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits", *Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies*, Vol. 37 Tahun 2010, Hlm. 86 – 104
- Ade Irawan, dkk, 2014, *Pandauan Pemantauan Korupsi Pemilu*, Indonesia Corruption Watch
- Ali, Danny Januar, *Politik Yang Mencari Bentuk: Kolom di Majalah Gatra*, Yogyakarta: LKiS, 2006
- Ali. Mahfud, "*Money politics dalam Pilkada*", *Jurnal Hukum*, Volume XII, No. 2, Oktober 2003, Hlm. 227-234
- Aqib, Zainal,. 2004. Karya tulis ilmiah bagi pengembangan guru.: Yrama Widya Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen penelitian*. : Rineka Cipta. Jakarta

- Badoh, Ibrahim Zuhdhy Fahmi, Kajian Potensi-Potensi Korupsi Pilkada, Jakarta: ICW, Januari 2010
- Budono. 2008. Panduan kegiatan sadar hukum kkn bagi aparatur pemerintah peguruan tinggi dan masyarakat. LPPNRI, Jakarta.
- Danim, Sudarwan,. 2002. : CV. Pustaka Setia, Menjadi peneliti kualitatif. Bandung
- Eko, Sutoro, Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi, Bahan Diskusi dalam Expert
- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan. Proposal dan Laporan Penelitian. MaLang: UMM PRESS.
- Hamdan Zoelva, 2014, *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*. Disampaikan pada Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pemilu 2014 Hanns Seidel Foundation (Hsf) Indonesia-Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pshk) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tanggal, 22 Februari 2014
- Indra Ismawan, 2009. POLITIK UANG Pengaruh Uang dalam Pemilu. (Yogyakarta: Media Presindo)
- Lesmana, Teddy, “*Politik Uang Dalam Pilkada*” (elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/.../9009. Pdf diunduh tgl. 2 Desember 2015)
- M. Abdul Kholiq, 2014, *Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politic dan Korupsi Politik dalam Pemilu*. Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 maret 2014.
- Meeting “Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR – RI”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 12 Januari 2004, (www.ireyogya.org/sutoro/pilkada_secara_langsung.pdf, diunduh tgl. 1 Desember 2011)
- PERDA NO 6 TAHUN 2006
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Qonita Alya (Anggota IKAPI),
Kamus Bahasa
Indonesia.Jakarta : PT.
Indah Jaya Adi Pratama,
2009.